



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 April 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : THARIQ MEGAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 922074

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 307.125.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 77.125.000
2. Tanah Seluas 532 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 425.200.000

1. MOBIL, SUZUKI BALENO SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, THRILL SEPEDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. LAINNYA, UNITED/MIAMI SEPEDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000
5. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 1963, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 1963, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 1963, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000



8. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SUV Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	200.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	200.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.156.325.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.156.325.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.